

Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengadaan Barang/Jasa Dan Komitmen Organisasi terhadap Penyerapan Anggaran Belanja

Lufandati Lestari¹, Nur Laila Yuliani^{2*}

^{1,2} Akuntansi / Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia.

*email: nurlailay@unimma.ac.id

ABSTRACT

Keywords:
Budget Planning,
Budget
Execution,
Quality of
Human
Resources,
Procurement of
Goods/Services,
Organizational
Commitment,
Budget
Absorption

Budget absorption is one of the parameters of the government's success in implementing programs or policies. Budget absorption is low in the beginning and middle of the fiscal year, but increases toward the conclusion. The goal of this research is to show how budget planning, budget execution, human resource quality, procurement of goods/services, and organizational commitment affect budget absorption. The purpose sampling method was used to select a sample of employees from the OPD Magelang Regency. There were 174 respondents in this study's sample. Data quality testing, multiple linear regression testing, and hypothesis testing are the data analysis methods used. The findings revealed that human resource quality and purchase of goods/services had a positive impact on budget absorption. Budget planning, budget implementation, and organizational commitment, on the other hand, have no effect on budget absorption.

ABSTRAK

Kata Kunci:
Perencanaan
Anggaran,
Pelaksanaan
Anggaran,
Kualitas Sumber
Daya Manusia,
Pengadaan
Barang/Jasa,
Komitmen
Organisasi,
Penyerapan
Anggaran
Belanja

Penyerapan anggaran merupakan salah satu parameter yang dapat menunjukkan keberhasilan program atau kebijakan yang dilakukan pemerintah. Permasalahan yang terjadi yaitu penyerapan anggaran yang rendah pada awal sampai pertengahan, tetapi akan melonjak menjelang akhir tahun anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia, pengadaan barang/jasa dan komitmen organisasi terhadap penyerapan anggaran belanja. Penelitian ini menggunakan sampel pegawai yang bekerja di OPD Kabupaten Magelang dengan metode *purpose sampling*. Jumlah sampel penelitian ini sebanyak 174 responden. Metode analisis data yang digunakan adalah uji kualitas data, uji regresi linier berganda dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia dan pengadaan barang/jasa berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran belanja. Sedangkan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja.

PENDAHULUAN

Penyerapan anggaran merupakan salah satu parameter yang menunjukkan keberhasilan dari program ataupun kebijakan yang telah dilakukan suatu pemerintah (Anfujatin, 2016). Salah satu yang menjadi permasalahan dalam suatu anggaran pemerintah adalah penyerapan anggaran yang cenderung rendah di awal tahun dan menumpuk di akhir tahun menyebabkan ketidakmerataan penyerapan anggaran (Suwarni, 2018). Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tentunya dalam melaksanakan tugas dan juga fungsinya akan berpedoman pada tingkat kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang dapat diukur melalui realisasi anggaran dan juga belanjanya. Anggaran belanja daerah mempunyai peranan nyata dalam peningkatan kualitas pelayanan publik serta sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik. Penyerapan anggaran belanja yang rendah tentunya perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan hendaknya lebih ditekankan lagi mengenai pentingnya penyerapan anggaran belanja tersebut secara optimal terutama pada kategori belanja barang dan belanja modal yang akan berpengaruh pada target kinerja OPD. Maka dapat dikatakan bahwa optimalnya penyerapan anggaran belanja akan berdampak pada tingkat pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Fenomena penyerapan anggaran belanja ini juga terjadi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Magelang, sebagaimana dapat diketahui bahwa rata-rata serapan anggaran masih belum optimal dan dinilai lambat, yang menjadikan serapan anggaran belanja tersebut masih rendah dan akan berdampak negatif terhadap perekonomian. Proses pengadaan barang dan jasa seringkali menjadi kendala yang mengakibatkan lambatnya realisasi anggaran tersebut. Keterlambatan penyerapan anggaran belanja juga dipengaruhi oleh beberapa aspek baik dari internal maupun eksternal, salah satunya mencakup kesiapsiagaan satuan kerja dalam menjalankan program dan kegiatan. Karena lemahnya perencanaan anggaran mencerminkan pelaksanaan program yang lemah dan kurang matang.

Tabel 1 Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten/Kota se Eks-Karesidenan Kedu Tahun 2017-2020

Kab/Kota	2017	2018	2019	2020
Kota Magelang	595.231.223.156	657.171.555.875	706.344.363.880	644.799.420.000
Kab. Magelang	1.011.004.215.485	958.693.240.730	876.760.016.030	608.038.846.315
Kab. Temanggung	720.729.256.000	605.366.260.000	702.126.497.000	737.708.195.000
Kab. Kebumen	965.656.948.000	975.539.649.000	1.101.849.363.000	1.145.293.443.000
Kab. Purworejo	916.011.207.000	874.355.451.000	805.605.215.000	930.021.689.000
Kab. Wonosobo	715.097.461.000	853.720.739.000	964.043.396.000	864.690.333.000

Sumber: BPS Jawa Tengah, Survei Statistik Keuangan, Data APBD.

Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah, dimana realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Magelang pada tahun 2017-2020 masih tergolong rendah atau belum maksimal dibandingkan dengan Kabupaten/Kota dalam se eks-karesidenan kedua yang penyerapannya masih cenderung stabil. Penyerapan anggaran belanja langsung pada Pemerintah Kabupaten Magelang mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020.

Kurangnya penyerapan anggaran di Kabupaten Magelang kerap kali dianggap sebagai buruknya kinerja birokrasi. Namun dalam sistem penyerapan anggaran berbasis kinerja tersebut tidak dapat dijadikan sebagai parameter karena sejatinya kinerja birokrasi tidak bisa diukur semata-mata dengan penyerapan anggaran, akan tetapi keadaan perekonomian saat ini lah yang masih bergantung pada konsumsi pemerintah yang kemudian belanja pemerintah turut menjadi salah satu penggerak berputarnya roda perekonomian. Penyerapan anggaran memang penting untuk mendongkrak terciptanya *multiplier effect* terhadap perekonomian daerah yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakatnya dalam hal ini pada Kabupaten Magelang. Kegagalan penyerapan anggaran akan berakibat pada hilangnya manfaat belanja, karena dana yang didistribusikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah meskipun dana belanja tersebut dapat dimanfaatkan kembali pada tahun anggaran selanjutnya, namun dana tersebut berpotensi akan berkurang atau kehilangan manfaat belanja yang seharusnya bisa dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran masyarakat sesuai dengan konsep *value of money*.

Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap penyerapan anggaran seperti faktor perencanaan anggaran, dimana perencanaan anggaran merupakan suatu rancangan sebagai bentuk pengendalian yang akan ditempuh oleh organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Permasalahan yang muncul di dalam perencanaan anggaran pada OPD Kabupaten Magelang diakibatkan karena adanya rancangan perencanaan yang belum matang dan berdampak pada program kerja yang tidak berjalan dengan baik. Selain itu, masalah yang terjadi dalam perencanaan juga diakibatkan karena adanya anggapan suatu anggaran yang telah diusulkan namun tidak semuanya disetujui sehingga lemahnya perencanaan tersebut menghambat proses perencanaan yang berakibat pada penyerapan anggaran. Pelaksanaan sasaran program dan kegiatan yang sesuai melalui perencanaan yang optimal tentunya dapat mempermudah pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.

Penelitian yang dilakukan Puluala (2021), menyatakan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran belanja, karena semakin matang pengelola anggaran dalam merencanakan, maka program/kegiatan dalam satu tahun anggaran akan berjalan dengan baik, sehingga target dari penyerapan anggaran dapat tercapai. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

Ramadhani & Setiawan (2019), bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran belanja. Namun sebaliknya, berbeda dengan penelitian yang dilakukan Rifai et al. (2016) yang menyatakan bahwa perencanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi penyerapan anggaran adalah faktor pelaksanaan anggaran, dimana pelaksanaan anggaran merupakan tahapan pengelolaan keuangan yang harus dilakukan setelah proses perencanaan anggaran selesai dilakukan. Pelaksanaan merupakan suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk mengimplementasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan. Proses pelaksanaan anggaran mencakup persoalan-persoalan yang muncul di internal unit kerja dan proses mekanisme pembayaran (pencairan anggaran), yang kedua hal tersebut akan mempengaruhi besar kecilnya suatu penyerapan anggaran (Puluala, 2021). Salah satu parameter yang penting untuk mengetahui kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah dengan mengukur tingkat penyerapan anggaran dalam pelaksanaan anggaran.

Pelaksanaan anggaran pada OPD Kabupaten Magelang seringkali terdapat kendala-kendala yang mengakibatkan program/kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal atau rencana awal yang telah ditetapkan sehingga akan mempengaruhi realisasi anggaran. Hal tersebut menyebabkan pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai oleh anggaran akan mundur waktu pelaksanaannya dan tentunya berakibat pula pada mundurnya waktu penyerapan anggaran. Menurut Purwati et al, (2021) menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran daerah. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin baik suatu pelaksanaan anggaran akan semakin baik pula penyerapan anggaran belanja pada suatu OPD.

Aparatur Sipil Negara (ASN) selaku pihak yang mengelola keuangan juga merupakan faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran. Hal tersebut dikarenakan, dalam menghadapi lingkungan dan kondisi sosial masyarakat yang senantiasa mengalami perubahan sekaligus untuk mendukung daya saing di era globalisasi, sumber daya manusia yang unggul akan menjadi aset instansi pemerintahan. Keterlambatan penyerapan anggaran belanja apabila suatu organisasi memiliki sumber daya manusia yang kurang kompeten maka akan berakibat pada lemahnya tujuan organisasi.

Kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja karena memiliki tolok ukur dominan yakni sumber daya manusia yang mau menjalankan tugasnya sesuai dengan keahliannya masing-masing, yang dapat disimpulkan bahwa kelebihan tersebut menjadi poin tersendiri dalam meningkatkan kinerja guna mencapai tujuan organisasi. Sebagai tenaga kerja, sumber daya manusia dalam pelaksanaan anggaran dapat terlihat pada fungsi dari manusianya sebagai satuan kerja yang memiliki tugas salah satunya sebagai panitia pengadaan barang dan jasa yang tentunya harus memahami dengan baik tata cara dan prosedur teknis dalam pengadaan barang dan jasa.

Permasalahan sumber daya manusia yang mengelola keuangan pada OPD Kabupaten Magelang antara lain karena kurangnya jumlah pegawai dan adanya rangkap pekerjaan maupun jabatan dan ketidakmerataan pola mutasi sehingga menjadikan kurang maksimalnya penyerapan anggaran belanja.

Penelitian yang dilakukan oleh Puluala, (2021) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran. Peningkatan kualitas sumber daya manusia hendaknya dilakukan di semua bidang pada instansi. Sejalan dengan penelitian Mutmainna, (2017) yang juga menyatakan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh pada penyerapan anggaran. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Alumbida, (2016), Nugroho, (2017) serta Ramadhani & Setiawan, (2019) yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh pada penyerapan anggaran.

Faktor berikutnya merupakan pengadaan barang/jasa yang mempengaruhi penyerapan anggaran, dimana pengadaan barang/jasa adalah salah satu tugas organisasi sektor publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Bastian, 2010). Faktor pengadaan barang/jasa pada OPD Kabupaten Magelang yang buruk dalam pelaksanaan kegiatannya memiliki kecenderungan akan memperlambat penyerapan anggaran dalam satuan kerja tersebut. Ramadhani & Setiawan, (2019) dan Alimuddin, (2018) menyatakan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap penyerapan anggaran disebabkan oleh pengadaan barang/jasa. Akan tetapi lain halnya dengan penelitian Nugroho, (2017) dan Sanjaya et al, (2018) yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Puluala, (2021) dengan perbedaan menambah variabel Komitmen Organisasi sesuai dengan saran penelitian Ramadhani & Setiawan, (2019). Alasan penambahan variabel tersebut karena semakin tinggi keterlibatan dan kepatuhan kerja seorang pegawai dalam OPD berarti semakin baik pula dalam pelaksanaan realisasi penyerapan anggaran. Komitmen yang tinggi sangat memungkinkan setiap anggota dalam satuan kerja untuk meningkatkan seluruh kemampuan yang dimilikinya, dan kurangnya komitmen akan menjadikan pekerjaan-pekerjaan yang besar menjadi terasa berat untuk dikerjakan.

Komitmen organisasi merupakan suatu tingkat kepatuhan atau keyakinan dari sejauh mana seorang pegawai memihak dan terlibat dalam suatu organisasi tertentu yang mempunyai tujuan untuk memelihara keanggotaan dalam organisasinya itu. Kennedy et al, (2020) menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Lemahnya penyerapan anggaran pada OPD di Kabupaten Magelang karena kurangnya komitmen organisasi dimana sikap maupun perasaan yang dimiliki oleh individu dalam organisasi tersebut belum memberikan kontribusi yang terbaik untuk memaksimalkan penyerapan anggaran belanja. Terlibatnya individu dalam hal ini Aparatur Sipil Negara (ASN) selaku pihak yang mengelola keuangan demi kepentingan

organisasinya dengan sepenuh usaha dan loyalitas akan mendukung keberhasilan dalam pencapaian tujuan khususnya dalam tercapainya target penyerapan anggaran belanja.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia dan pengadaan barang/jasa terhadap penyerapan anggaran. Alasan melakukan penelitian di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Magelang. OPD Kabupaten Magelang yang masih memiliki permasalahan dalam hal penyerapan anggaran karena tingkat realisasi penyerapan anggarannya masih belum mencapai target dari 100% namun baru terserap sekitar kurang dari 90% dan terpantau belum stabil karna masih naik turun setiap tahunnya. Karena masih terdapat fenomena yang terjadi dalam penyerapan anggaran belanja yang dinilai masih lambat dan tidak merata sampai akhir tahun, maka OPD Kabupaten Magelang perlu mengevaluasi hal-hal apa saja yang dapat dimaksimalkan lagi untuk meningkatkan penyerapan anggaran belanja.

METODE

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Aparat Sipil Negara yang bekerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang terdiri dari 33 OPD. Alasan menggunakan 33 OPD karena OPD Dinas dan Badan mempunyai anggaran yang lebih besar jika dibandingkan dengan OPD kecamatan sehingga kendala dalam penyerapan dapat terpenuhi dengan baik. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *purposive sampling*. Adapun kriteria atau karakteristik responden dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. PA (Pengguna Anggaran)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Kepala Sub Bidang Keuangan, Bendahara Pengeluaran dan Staf Bagian Program/Keuangan.
2. Memiliki masa kerja minimal 1 tahun.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional variabel dan pengukuran variabel pada penelitian ini berdasarkan literature dan telaah penelitian terdahulu yang digunakan. Pengukuran variabel menggunakan skala likert 1-5, yaitu skala 1= Sangat Tidak Setuju sampai skala 5 = Sangat Setuju. Definisi operasional dan pengukuran variabel dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran	Skala
Penyerapan Anggaran Belanja (PAB)	Penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator yang menunjukkan keberhasilan program atau kebijakan yang telah dilakukan	Instrumen penelitian ini mengacu pada penelitian (Harahap et al, 2020) yang terdiri dari 3 item pernyataan dengan indikatornya yaitu:	Interval

Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran	Skala
	suatu pemerintah (Anfujatin, 2016).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbandingan antara realisasi anggaran dengan target yang hendak dicapai. 2. Realisasi penyerapan anggaran per triwulan. 3. Kesesuaian dalam pelaksanaan program/kegiatan serta ketepatan waktu dalam jadwal penyerapan anggaran. 	
Perencanaan Anggaran (PR)	Perencanaan Anggaran merupakan proses pendefinisian tujuan, penentuan strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dan pengembangan serangkaian rencana komprehensif untuk menggabungkan dan mengkoordinasi berbagai aktivitas (Ramadhani & Setiawan, 2019).	Instrumen penelitian ini mengacu pada penelitian (Harahap et al, 2020) yang terdiri dari 9 item pernyataan dengan indikatornya yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Komprehensif. 2. Terperinci. 3. Disiplin. 4. Fleksibel. 5. Prioritas. 6. Keterbukaan. 	Interval
Pelaksanaan Anggaran (PL)	Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha yang dilaksanakan untuk merealisasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan telah ditetapkan (Harahap et al, 2020).	Instrumen penelitian ini mengacu pada penelitian (Harahap et al, 2020) yang terdiri dari 3 item pernyataan dengan indikatornya yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Budaya kerja. 2. Penyelesaian Administrasi. 3. Proses pemeriksaan SPJ. 4. Jadwal anggaran kas. 	Interval
Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Kualitas Sumber daya manusia merupakan sebuah karakteristik dasar seseorang yang mengindikasikan cara berfikir, bersikap dan bertindak (Puluala, 2021).	Instrumen penelitian ini mengacu pada penelitian (Harahap et al, 2020) yang terdiri dari 12 item pernyataan dengan indikatornya yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Knowledge</i>. 2. <i>Skills</i>. 3. <i>Attitude</i>. 	Interval
Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)	Pengadaan Barang/Jasa merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh barang/jasa yang prosesnya dimulai dari mengidentifikasi kebutuhan hingga diselesaikannya seluruh kegiatan guna memperoleh barang/jasa pemerintah (Purwati et al, 2021).	Instrumen penelitian ini mengacu pada penelitian (Harahap et al, 2020) yang terdiri dari 8 item pernyataan dengan indikatornya yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Efisien. 2. Efektif. 3. Terbuka dan bersaing. 4. Transparan. 5. Adil. 6. Akuntabel. 	Interval
Komitmen Organisasi (KO)	Komitmen organisasi merupakan wujud sikap keinginan yang kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu, mempunyai usaha yang keras sesuai dengan keinginan organisasi tertentu, serta mempunyai keyakinan tertentu dalam penerimaan nilai atas tujuan organisasi (Kennedy et al, 2020).	Instrumen penelitian ini mengacu pada penelitian (Kennedy et al, 2020) yang terdiri dari 13 item pernyataan dengan indikatornya yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Affective Commitment</i>. 2. <i>Continuance Commitment</i>. 3. <i>Normative Commitment</i>. 	Interval

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data meliputi statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis. Validitas dalam penelitian diuji dengan menggunakan *Confirmatory Factor Analysis* (CFA) dengan kriteria nilai KMO and *Barlett's test* dan nilai *cross loading* > 0,50. Sedangkan reliabilitas diuji dengan menghitung nilai *Cronbach Alpha*. Suatu konstruk dikatakan reliabel apabila memiliki nilai *Cronbach Alpha* > 0,70. Pengujian hipotesis meliputi uji koefisien determinasi (R²) dengan melihat *adjustade r square*, uji ketepatan model (*goodness of fit test*) dengan uji F dan uji t, dengan tingkat signifikansi 5% (Ghozali, 2018). Berikut persamaan regresi linier berganda:

$$PAB = \alpha + \beta_1 PR + \beta_2 PL + \beta_3 SDM + \beta_4 PBJ + \beta_5 KO + e$$

Keterangan:

PAB	= Penyerapan Anggaran Belanja
α	= Konstanta
β	= Koefisien Regresi
PR	= Perencanaan Anggaran
PL	= Pelaksanaan Anggaran
SDM	= Kualitas Sumber Daya Manusia
PBJ	= Pengadaan Barang/Jasa
KO	= Komitmen Organisasi
e	= Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi (Ghozali, 2018). Hasil uji statistik diskriptif menunjukkan bahwa rata-rata responden menjawab 4 atau Setuju. Tabel 3 menunjukkan hasil uji statistik deskriptif.

Tabel 3 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penyerapan Anggaran Belanja	174	3,00	5,00	4,1437	0,47728
Perencanaan Anggaran	174	3,00	5,00	4,1954	0,45207
Pelaksanaan Anggaran	174	3,00	5,00	4,2126	0,47560
Sumber Daya Manusia	174	3,00	5,00	4,1379	0,42119
Pengadaan Barang/Jasa	174	3,00	5,00	4,3046	0,49772
Komitmen Organisasi	174	2,00	4,00	3,3046	0,57328

Sumber; Data primer diolah, 2022

Uji Validitas

Hasil pengujian validitas dapat diperoleh nilai cross loading > 0,50, sehingga pernyataan kuesioner dinyatakan valid. Namun terdapat 6 item pernyataan yang tidak valid atau sebesar 14,5%. Item pernyataan yang tidak valid yaitu komitmen organisasi (KO) 6, 7, 8, 9, 11 dan 12, sehingga tidak dapat digunakan dalam pengujian selanjutnya. Berikut hasil uji validitas dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabe 4 Hasil Uji Validita

Item	PAB	PR	PL	SDM	PBJ	KO	Ket
PAB1	0,737						Valid
PAB2	0,864						Valid
PAB3	0,889						Valid
PR 1		0,736					Valid
PR 2		0,806					Valid
PR 3		0,841					Valid
PR 4		0,729					Valid
PR 5		0,663					Valid
PR 6		0,752					Valid
PR 7		0,838					Valid
PR 8		0,632					Valid
PR 9		0,840					Valid
PL 1			0,866				Valid
PL 2			0,914				Valid
PL 3			0,855				Valid
SDM 1				0,748			Valid
SDM 2				0,737			Valid
SDM 3				0,786			Valid
SDM 4				0,777			Valid
SDM 5				0,776			Valid
SDM 6				0,727			Valid
SDM 7				0,784			Valid
SDM 8				0,765			Valid
SDM 9				0,732			Valid
SDM 10				0,774			Valid
SDM 11				0,743			Valid
SDM 12				0,678			Valid
PBJ 1					0,690		Valid
PBJ 2					0,808		Valid
PBJ 3					0,835		Valid
PBJ 4					0,802		Valid
PBJ 5					0,684		Valid
PBJ 6					0,821		Valid
PBJ 7					0,801		Valid
PBJ 8					0,800		Valid
KO 1						0,855	Valid
KO 2						0,847	Valid
KO 3						0,772	Valid
KO 4						0,621	Valid
KO 5						0,773	Valid
KO 10						0,729	Valid
KO 13						0,612	Valid

Sumber; Data primer diolah, 2022

Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas pada penelitian ini menunjukkan bahwa *Cronbach's Alpha* > 0,70, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel. Hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Penyerapan Anggaran Belanja	0,751	Reliabel
Perencanaan Anggaran	0,907	Reliabel
Pelaksanaan Anggaran	0,853	Reliabel
Sumber Daya Manusia	0,929	Reliabel
Pengadaan Barang/Jasa	0,906	Reliabel
Komitmen Organisasi	0,854	Reliabel

Sumber; Data primer diolah, 2022

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6 Koefisien Regresi

Keterangan	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2,201	0,410		5,375	0,000
Perencanaan Anggaran	0,001	0,098	0,001	0,015	0,988
Pelaksanaan Anggaran	-0,080	0,112	-0,080	-0,716	0,475
Sumber Daya Manusia	0,276	0,112	0,243	2,452	0,015
Pengadaan Barang/Jasa	0,261	0,092	0,272	2,840	0,005
Komitmen Organisasi	0,003	0,062	0,004	0,048	0,962

Sumber; Data primer diolah, 2022

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda pada Tabel 6 dapat diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$PAB = 2,201 + 0,001PR - 0,080PL + 0,276SDM + 0,261PBJ + 0,003KO + e$$

Pengujian Hipotesis

Uji R² (Koefisien Determinasi)

Hasil pengujian R² menunjukkan nilai *Ajusted R Square* sebesar 13,2%. Hal ini berarti variabel Perencanaan Anggaran (PR), Pelaksanaan Anggaran (PL), Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Dan Komitmen Organisasi

(KO) mampu menjelaskan variabel Penyerapan Anggaran Belanja (PAB) sebesar 13,2% sedangkan sisanya (100% - 13,2%) 86,8% dijelaskan oleh faktor-faktor lain dari luar penelitian ini. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7 Hasil Uji R²

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,396 ^a	0,157	0,132	0,44473

Sumber; Data primer diolah, 2022

Uji F (goodness of fit test)

Pengujian ini digunakan untuk melihat kelayakan model pada penelitian ini. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini fit atau layak. Hasil pengujian tersebut dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8 Hasil Uji F

Keterangan	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	6,180	5	1,236	6,249	0.000 ^b
Residual	33,228	168	0,198		
Total	39,408	173			

Sumber; Data primer diolah, 2022

Uji t

Pengujian t dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji t dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9 Hasil Uji t

Variabel	t hitung	t tabel	Sig.	Keterangan
Perencanaan Anggaran	0,015	1,973	0,988	H1 tidak diterima
Pelaksanaan Anggaran	-0,716	1,973	0,475	H2 tidak diterima
Sumber Daya Manusia	2,452	1,973	0,015	H ₃ diterima
Pengadaan Barang/Jasa	2,840	1,973	0,005	H4 diterima
Komitmen Organisasi	0,048	1,973	0,962	H5 tidak diterima

Sumber; Data primer diolah, 2022

Pembahasan

Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja

Berdasarkan tabel 9 menunjukkan bahwa perencanaan anggaran memiliki nilai t hitung=0,015 < t tabel=1,973 dan p value=0,988 > α=0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja, sehingga **H₁ tidak diterima**. Hal ini dapat diartikan bahwa perencanaan anggaran yang baik tidak dapat meningkatkan penyerapan anggaran belanja di OPD Kabupaten

Magelang. Hal tersebut terjadi karena adanya permasalahan pada OPD yang berkaitan dengan perencanaan maupun penentuan anggaran yang timbul didalam perencanaan, dimana terdapat suatu pendapat bahwa usulan anggaran yang tidak semuanya akan disetujui yang menjadikan perencanaan anggaran tersebut tidak mempengaruhi penyerapan anggaran belanja. Faktor penyebabnya dapat berasal dari usulan anggaran yang lebih besar dibanding biaya yang dibutuhkan tanpa lebih dulu memikirkan kebutuhan riil nya di lapangan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan *theory of reasoned action*, bahwa perilaku dapat berubah berdasarkan dengan niat pelaku yang menekankan pada pentingnya hubungan antara tujuan yang ditetapkan dengan kinerja yang dihasilkan. Apabila seseorang mempunyai keyakinan terhadap tujuan yang diharapkan oleh suatu organisasi, maka adanya pemahaman tersebut akan berpengaruh terhadap perilaku kerjanya. Adanya konsep dalam perencanaan penggunaan anggaran yang secara nyata tentu akan mengarahkan penggunaan anggaran secara tepat sesuai dengan sasaran dan tujuan. Maka semakin baik perencanaan anggaran yang disusun, tentunya akan memudahkan proses pelaksanaan atau pun realisasi pada tahun anggaran yang sedang berjalan sehingga akan meningkatkan penyerapan anggaran belanja. Namun hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Rifai et al. (2016), yang menyatakan bahwa perencanaan anggaran tidak berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Kennedy et al. (2020), Harahap et al. (2020) dan Puluwala (2021) yang menyatakan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.

Pengaruh Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja

Berdasarkan tabel 9 menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran memiliki nilai t hitung = -0,716 < t tabel = 1,973 dan p value = 0,475 > α = 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja, sehingga **H₂ tidak diterima**. Hal ini dapat diartikan bahwa pelaksanaan anggaran yang baik tidak dapat meningkatkan penyerapan anggaran belanja di OPD Kabupaten Magelang. Hal tersebut terjadi karena penyerapan anggaran belanja dipengaruhi oleh aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk merealisasikan rencana yang telah ditetapkan. Pelaksanaan anggaran pada OPD Kabupaten Magelang berdasarkan hasil penelitian tidak mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran belanja mulai dari ditetapkannya anggaran, pelaksanaan dan evaluasi program serta kegiatan termasuk tahap dimana sumber daya digunakan untuk melaksanakan kebijakan anggaran tersebut.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Puluwala (2021) yang menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran tidak berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Harahap et al., (2020)

dan Purwati et al, (2021) yang menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja

Berdasarkan tabel 9 menunjukkan bahwa perencanaan penganggaran memiliki nilai t hitung=2,452 > t tabel=1,973 dan p value=0,015 < α =0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas sumberdaya manusia berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran belanja, sehingga **H₃ diterima**. Hal ini dapat diartikan bahwa kualitas sumber daya manusia yang baik akan dapat meningkatkan penyerapan anggaran belanja di OPD Kabupaten Magelang. Hal tersebut terjadi karena dimilikinya pengetahuan, kemampuan, motivasi dan persepsi pegawai yang baik akan mendukung lancarnya penyerapan anggaran belanja. Selain itu, tercukupinya jumlah pegawai, tidak adanya rangkap pekerjaan maupun jabatan dan meratanya pola mutasi juga mendorong dalam peningkatan penyerapan anggaran.

Hasil penelitian ini sejalan dengan *theory of reasoned action* bahwa pemerintah mempunyai peranan sebagai sumber daya manusia yang harapannya sesuai dengan kompetensi dan pembagian kerja yang telah ditetapkan. Hal tersebut tentunya juga sesuai dengan kemampuannya sehingga apa yang menjadi tujuan dari organisasi pemerintahan dapat tercapai sejalan dengan apa yang telah direncanakan. Semakin baik kualitas sumber daya manusia di dalam suatu OPD yang sudah paham akan tugas dan wewenang atas fungsi jabatan masing-masing maka penyerapan anggaran juga akan semakin meningkat. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Harahap et al., (2020), Puluala (2021), dan Purwati et al, (2021) yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Ramadhani & Setiawan (2019), yang menyatakan bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.

Pengaruh Pengadaan Barang/Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja

Berdasarkan tabel 9 menunjukkan bahwa perencanaan penganggaran memiliki nilai t hitung=2,840 > t tabel=1,973 dan p value=0,005 < α =0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa pengadaan barang/jasa berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran belanja, sehingga **H₄ diterima**. Hal ini dapat diartikan bahwa pengadaan barang/jasa yang tepat akan memberikan pengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran belanja di OPD Kabupaten Magelang. Hal tersebut terjadi karena tersedianya pejabat/panitia pengadaan barang/jasa, pembentukan struktur organisasi dan penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam pengadaan barang/jasa yang kemudian mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran belanja.

Hasil penelitian ini sejalan dengan *theory of reasoned action*, bahwa pemerintah daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan daerah yang memberikan pelayanan atas kebutuhan masyarakat dengan proses pengadaan barang/jasa secara online yang hal tersebut merupakan salah satu cara untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran. Dalam melaksanakan program dan kegiatan disetiap OPD untuk merealisasikan belanja langsung, hal tersebut dapat dilakukan melalui swakelola maupun melalui jasa penyedia. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Elim et al, (2018) dan Purwati et al, (2021) yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Ramadhani & Setiawan (2019) dan Puluala (2021) yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa tidak berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.

Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja

Berdasarkan tabel 9 menunjukkan bahwa komitmen organisasi memiliki nilai t hitung=0,048 < t tabel=1,973 dan p value=0,962 > α =0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja, sehingga **H₅ tidak diterima**. Hal ini dapat diartikan bahwa tinggi rendahnya komitmen pegawai di OPD Kabupaten Magelang tidak bisa mempengaruhi penyerapan anggaran belanja. Hal tersebut terjadi karena bagaimana seseorang akan memposisikan dirinya pada suatu organisasi tersebut dan kesanggupannya untuk meneruskan usaha pencapaian kepentingan organisasinya, sehingga komitmen organisasi tidak dapat mempengaruhi penyerapan anggaran belanja.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan *theory of reasoned action*, bahwa pegawai yang didukung dengan nita, keyakinan serta komitmen yang tinggi terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan lebih mengutamakan kepentingan organisasi dibanding kepentingan pribadi. Komitmen yang tinggi tersebut tentunya akan mendorong pegawai untuk mencapai target anggaran sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi sehingga akan berimplikasi terhadap pencapaian penyerapan anggaran belanja. Menurut Putri et al. (2017), yang menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa kualitas sumber daya manusia dan pengadaan barang/jasa berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran belanja. Sedangkan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel seperti efektivitas pelaksanaan anggaran yang diharapkan dapat berpengaruh lebih tinggi terhadap penyerapan anggaran. Sistem pelaksanaan anggaran

harus memastikan kepatuhan terhadap kewenangan anggaran serta mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pemantauan dan pelaporan yang dapat segera mengidentifikasi masalah pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan anggaran yang baik merupakan pelaksanaan yang tepat waktu, efektif dan efisien. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan antara lain kepatuhan terhadap peraturan, kesesuaian perencanaan dan penganggaran dengan pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan kegiatan dan efektivitas pelaksanaan kegiatan .

DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin. (2018). Analisis Penyerapan Anggaran di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Kopertis Makassar. Tesis. Universitas Hasanuddin.
- Alumbida. (2016). Pengaruh Perencanaan, Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Komitmen Organisasi Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Accountability*, 5(2), 141.
- Anfujatin. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Rendahnya Penyerapan Anggaran Belanja pada SKPD Kabupaten Tuban. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.14(No. 1), 1–16.
- Bastian. (2006). Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Bastian, I. (2010). Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga.
- Elim et al. (2018). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pada Organisasi Perangkat Daerah Di Kota Kupang. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Audit*, 3(2), 46–56.
- Ghozali. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harahap, S., Taufik, T., & Nurazlina. (2020). Pengaruh Perencanaan Anggaran , Pelaksanaan anggaran , Pencatatan Administrasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran (Studi Empiris pada OPD Kota Dumai). *Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 13(1), 1–10.
- Kennedy et al. (2020). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 13(2), 108–117.
- Mutmainna, M., & Iqbal, M. (2017). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 7(1), 120-132.
- Nugroho, R., & Alfarisi, S. (2017). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Melonjaknya Penyerapan Anggaran Quartal IV Instansi Pemerintah (Studi pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan). *Jurnal BPPK*, 10(1), 22-37.
- Puluala, M. G. (2021). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Pengadaan Barang dan Jasa Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Daerah. *Jurnal Sosial Teknologi*, 1(1), 1-9.

- Purwati, I., Arisyahidin, A., & Talkah, A. (2021). Analisis Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia, Pengadaan Barang Jasa Dan Lingkungan Birokrasi Terhadap Penyerapan Anggaran Di Kabupaten Kediri. *Otonomi*, 21(2), 244-261.
- Putri, K. M. R., Yuniarta, G. A., Ak, S. E., Si, M., & Prayudi, M. A. (2018). Pengaruh perencanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia dan komitmen organisasi terhadap penyerapan anggaran (Survei pada SKPD di wilayah Pemerintah daerah provinsi Bali). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).
- Ramadhani & Setiawan. (2019). Pengaruh Regulasi, Politik Anggaran, Perencanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia Dan Pengadaan Barang/ Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Pada OPD Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(2), 710–726.
- Rifai, A., Inapty, B. A., & Pancawati, S. M. (2016). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Daya Serap Anggaran (Studi Empiris pad SKPD Pemprov NTB). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 11(1), 1-10.
- Sanjaya, T. (2018). Pengaruh Regulasi Keuangan Daerah, Politik Anggaran Dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Pada OPD Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi*, 6(3).
- Suwarni. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Surabaya (Studi Pada SKPD Dinas PU Bina Marga dan Pematusan). *Publika*, 6(5), 1–7.